

SKRIPSI

**PENGAWASAN DISTRIBUSI *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* (LPG)
3 KILOGRAM BERSUBSIDI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PEMALSUAN
LPG 3 KILOGRAM BERSUBSIDI DI KOTA PADANG**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan
dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

AHMAD FADHIL ASWAD

2110112161

Program Kekhususan: Hukum Administrasi Negara (PK VII)



Pembimbing :

Prof. Dr. Khairani, S.H., M.H.

Sucy Delyarahmi, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2026

No. Reg: 18/PKVII/IV/2026

LEMBAR PENGESAHAN
VALIDITY SHEET

No.Reg: 18/PKVII/IV/2026

PENGAWASAN DISTRIBUSI *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* (LPG)
3 KILOGRAM BERSUBSIDI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PEMALSUAN
LPG 3 KILOGRAM BERSUBSIDI DI KOTA PADANG

SUPERVISION OF THE DISTRIBUTION OF SUBSIDIZED 3 KILOGRAM *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* (LPG) AS A MEASURE TO PREVENT THE COUNTERFEITING OF
SUBSIDIZED 3 KILOGRAM LPG IN PADANG CITY

Disusun Oleh
Author

AHMAD FADHIL ASWAD
2110112161

Program Kekhususan: Hukum Administrasi Negara (PK-VII)
Concentration Program: State Administrative Law (CPVII)

Skripsi ini telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 10 Agustus 2026
dan dinyatakan LULUS oleh Tim Penguji, terdiri dari:
*This thesis was defended in a Comprehensive Examination on August 10th, 2026, and was declared
PASSED by the Board of Examiners, consisting of:*

Dekan
Dean

Prof. Dr. Ferdi, S.H., M.Hum.
NIP. 196807231993021001

Wakil Dekan I
Vice Dean I

Dr. Nani Muhyati, S.H., M.CL.
NIP. 198208092005012002

Pembimbing I
Supervisor I

Prof. Dr. Khairani, S.H., M.H.
NIP. 196212111989012001

Pembimbing II
Supervisor II

Sucy Delvarahmi, S.H., M.H.
NIP. 199211262022032011

Penguji I
Examiner I

Dr. Anton Rosari, S.H., M.H.
NIP. 197502042006041001

Penguji II
Examiner II

Darnis, S.H., M.H.
NIP. 196202151989012001

	No. Alumni Universitas	Ahmad Fadhil Aswad	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir : Payakumbuh/ 11 Oktober 2002 b. Nama Orangtua : Nilaswan (Alm), Wirda c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Administrasi Negara e. No. BP : 2110112161	f. Tanggal Lulus : 10 Agustus 2026 g. Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h. Lama Studi : 4 Tahun 11 Bulan i. IPK : 3,61 j. Alamat : Jl. Sudirman, Balai Tongah Koto, Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh	

**PENGAWASAN DISTRIBUSI LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG)
3 KILOGRAM BERSUBSIDI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PEMALSUAN LPG 3 KILOGRAM
BERSUBSIDI DI KOTA PADANG**

(Ahmad Fadhil Aswad, 2110112161, Hukum Administrasi Negara,
Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 85 halaman, 2026)

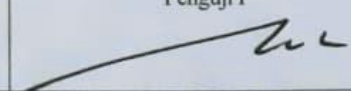
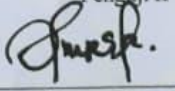
ABSTRAK

Liquefied Petroleum Gas (LPG) adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya. Adapun pendistribusian LPG adalah proses penyaluran LPG dari produsen atau penyedia ke konsumen akhir melalui serangkaian tahapan dan saluran distribusi yang terorganisir dan diatur oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu di Daerah, pada bagian konsideran, disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan program konversi minyak tanah ke *Liquefied Petroleum Gas (LPG)*, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan pendistribusian dengan melibatkan peran serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Seiring berjalannya program tersebut dan bersamaan dengan permintaan LPG 3 kilogram yang terus bertambah dan berbanding lurus dengan harga LPG yang terus meningkat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan pengoplosan LPG 3 kilogram bersubsidi. Maka masyarakatlah yang akan dirugikan dari tindakan pengoplosan ini karena LPG yang dijual pelaku usaha tersebut tidak sesuai standar. Kegiatan pengoplosan ini melanggar ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana penjual dilarang menjual suatu produk selain seperti standar yang berlaku atau diperjanjikan. Di Kota Padang sendiri, dalam kurun waktu satu tahun terakhir ditemukan beberapa kasus pemalsuan LPG 3 kilogram bersubsidi. Dalam hal ini, peran pemerintah daerah melalui dinas terkait sangat diperlukan agar kedepannya tidak terjadi lagi kasus-kasus serupa yang dapat merugikan bahkan membahayakan masyarakat selaku konsumen. Maka rumusan masalah yang dapat diangkat dari penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pengawasan distribusi gas bumi sebagai upaya pencegahan pemalsuan LPG bersubsidi Kota Padang, 2) Bagaimana tindak lanjut dari hasil pengawasan distribusi gas bumi sebagai upaya pencegahan pemalsuan LPG bersubsidi di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris, yakni dengan meneliti dan mengkaji mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Barat, Dinas Perdagangan Kota Padang, dan Pelaku Usaha LPG 3 Kilogram di Kota Padang. Di Kota Padang Pengawasan terhadap pendistribusian LPG 3 kilogram bersubsidi di dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang, selaku wakil pemerintah daerah di bidang perdagangan. Pengawasan terhadap pendistribusian LPG 3 kilogram bersubsidi terbagi 2 (dua) yakni Pengawasan Barang Kebutuhan Pokok dan Pengawasan Metrologi Legal. Pengawasan Kebutuhan Pokok adalah pengawasan yang dilakukan untuk memastikan ketersediaan, kelancaran distribusi, ketepatan sasaran penerima, dan harga yang terjangkau, khususnya untuk LPG bersubsidi. Adapun Pengawasan Metrologi Legal adalah pengawasan yang dilakukan untuk memastikan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapannya (UTTP) serta satuan ukur pada *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* 3 kilogram bersubsidi telah sesuai dengan standar untuk melindungi kepentingan masyarakat umum. Dalam melaksanakan tindak lanjut pengawasan terhadap Dinas Perdagangan Kota Padang selaku pengawas distribusi Barang Pokok dan Penting LPG 3 kilogram di wilayah Kota Padang menyiapkan langkah-langkah strategis kedepannya untuk mencegah terjadinya kasus serupa, yakni dengan cara meningkatkan koordinasi antar pihak-pihak terkait dan meningkatkan pengawasan secara berkala, sehingga diharapkan tidak ada lagi celah bagi oknum-oknum tidak bertanggungjawab untuk melakukan pemalsuan dan pengoplosan LPG 3 kilogram bersubsidi di Kota Padang.

Kata kunci : pengawasan, pendistribusian, pemalsuan, LPG 3 kilogram bersubsidi

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 10 Agustus 2026.

Penguji,

Tanda Tangan	Penguji I	Penguji II
		
Nama Terang	Dr. Anton Rosari, S.H., M.H.	Darnis, S.H., M.H.

Mengetahui,
Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara:

Hendria Fithrina, S.H., M.H



Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas /Universitas dan mendapat nomor alumnus:

Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama: Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama: Tanda Tangan:

	Alumni University Number	Ahmad Fadhil Aswad	Alumni University Number
	a. Place/Date of Birth : Payakumbuh / 11 th Oct. 2002	f. Graduation Date : 10 th August 2026	
	b. Parents' Name : Nilaswan (Alm), Wirda	g. Pass Predicate : 4 Years 11 Months	
	c. Faculty : Law	h. Length of Study : Very Satisfactory	
	d. Concentration : State Administrative Law	i. GPA : 3,61	
	e. Student ID : 2110112161	k. Address : Jl. Sudirman, Balai Tongah Koto, Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh	

SUPERVISION OF THE DISTRIBUTION OF SUBSIDIZED 3 KILOGRAM LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) AS A MEASURE TO PREVENT THE COUNTERFEITING OF SUBSIDIZED 3 KILOGRAM LPG IN PADANG CITY

(Ahmad Fadhil Aswad, 2110112161, Faculty of Law, Andalas University, 85 Pages)

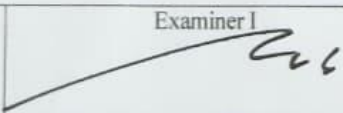
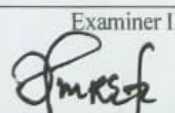
ABSTRACT

Liquefied Petroleum Gas (LPG) is a hydrocarbon gas liquefied under pressure to facilitate its storage, transportation, and handling. LPG distribution refers to the process of supplying LPG from producers or providers to end consumers through a series of stages and distribution channels that are organized and regulated by law. The Joint Regulation of the Minister of Home Affairs and the Minister of Energy and Mineral Resources (Number 17 of 2011 and Number 5 of 2011) concerning the Guidance and Supervision of the Closed Distribution of Specific Liquefied Petroleum Gas in the Regions states—in its considerations—that the implementation of the kerosene-to-LPG conversion program requires guidance and supervision of distribution, involving the participation of provincial and regency/city governments. As the program progressed, the steadily rising demand for 3-kilogram LPG—coupled with increasing LPG prices—was exploited by irresponsible individuals to engage in the adulteration (illegal decanting/mixing) of subsidized 3-kilogram LPG. Consequently, the public suffers losses from these adulteration practices, as the LPG sold by these business operators fails to meet required standards. Such adulteration activities violate the provisions of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which prohibits sellers from marketing products that do not comply with applicable or agreed-upon standards. In the city of Padang alone, several cases of 3-kilogram subsidized LPG adulteration have been discovered over the past year. In this context, the role of local government—through relevant agencies—is crucial to prevent the recurrence of similar cases that could harm or even endanger the public as consumers. Therefore, the problem formulation addressed in this study is: 1) How is the supervision of natural gas distribution conducted as an effort to prevent the counterfeiting of subsidized LPG in Padang City? 2) What are the follow-up actions resulting from the supervision of natural gas distribution aimed at preventing the counterfeiting of subsidized LPG in Padang City? This study employs a socio-legal (juridical-empirical) method, examining the direct implementation of normative legal provisions regarding specific legal events occurring within society. The research was conducted at the West Sumatra Province Energy and Mineral Resources Agency (ESDM), the Padang City Trade Agency, and among 3-kilogram LPG business operators in Padang City. In Padang City, the supervision of subsidized 3-kilogram LPG distribution is carried out by the Padang City Trade Agency, acting as the local government representative in the trade sector. This supervision is divided into two categories: supervision of basic necessities and legal metrology supervision. Supervision of basic necessities aims to ensure availability, smooth distribution, accurate targeting of recipients, and affordable prices, particularly for subsidized LPG. Meanwhile, legal metrology supervision ensures that measuring, dispensing, and weighing instruments and their accessories (UTTP), as well as the measurement units used for subsidized 3-kilogram LPG, comply with standards to protect the public interest. Regarding follow-up actions, the Padang City Trade Agency—as the supervisor of the distribution of 3-kilogram LPG (classified as a basic and essential commodity)—is preparing strategic measures to prevent similar cases in the future. These measures involve enhancing coordination among relevant parties and increasing the frequency of supervision, thereby eliminating opportunities for irresponsible individuals to engage in the counterfeiting and adulteration of subsidized 3-kilogram LPG in Padang City.

Keywords: supervision, distribution, counterfeiting, subsidized 3-kilogram LPG

This minor thesis has been successfully defended and regarded to graduate by August 10th, 2026.

Examiner,

Signature	Examiner I	Examiner II
		
Name	Dr. Anton Rosari, S.H., M.H.	Darnis, S.H., M.H.

Acquainted,
Head of the Department of State Administrative Law:

Hendria Fithrina, S.H., M.H



Signature

Alumnus has been registered in the Faculty/University under the number:

Faculty/University Officer	
No. Alumni Faculty	Name: Signature:
No. Alumni University	Name: Signature:

